

DAFTAR RUJUKAN

- Adiasa, N. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2, Nomor 2). <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233> Diakses pada 28 Januari 2022
- Agustinus, M. (2021). *Peraturan Pemerintah No.23 2018 UMKM*. <https://www.pajak.com/pwf/peraturan-pemerintah-no-23-2018-umkm/>
- Alfian, N., Gazali, Bustaram, I., Syaiful, Djaja, H., & Amar, S. S. (2021). *Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 6(2), 89–101.
- Aryanta, I. K. A. (2023). *Pendapatan Badung Kembali Tak Mencapai Target, Bapenda Sebut Akhir Tahun Ada Tren Peningkatan*. <https://bali.tribunnews.com/2021/12/30/pendapatan-badung-kembali-tak-mencapai-target-bapenda-sebut-akhir-tahun-ada-tren-peningkatan> Diakses pada 23 Mei 2023
- Asdevi, T. (2022). Pengaruh Kualita Pelayanan Petgas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi. *Skripsi*.
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08> Diakses pada 20 November 2023
- CNN Indonesia. (2021). *APBN Negara Tekor Rp 611 Triliun per November 2021*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211221112717-532-736679/apbn-negara-tekor-rp611-triliun-per-november-2021> Diakses pada 20 Juni 2022
- Dinas Koperasi, U. P. B. (2022). *Data Keragaan Umkm Bali Tahun 2022*. 2022.
- Dirjen Pajak Kantor Wilayah Bali. (2022). *Kanwil DJP Bali Rilis Realisasi Penerimaan Triwulan 2022*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kanwil-djp-bali-rilis-realisis-penerimaan-triwulan-i-2022> Diakses pada 22 Juli 2022
- Endrayanto, P., Adiputra, A. K., Utami, L. R., & Rahayu, P. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. 4(1), 226–236.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. 978–979.
- Fajrian Putra, A., & Hakim bin Osman, A. (2019). *Tax compliance of MSME ' s taxpayer : Implementation of theory of planned behavior Tax compliance of MSME ' s taxpayer : Implementation of theory of planned behavior*. 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art1> Diakses pada 28 Juni 2023
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). *The Effect of Understanding and Religiosity on MSME Taxpayer Compliance in Paying Tax PP 23 Year 2018*. 03(01), 1–22.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif*

- Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang*. 16(02), 88–103.
- Fitria, A., & Wulandari, S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. 8(1), 134–140.
- Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2013). *Implementasi Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMKM Wilayah Semarang)*. 1–11.
- Hasfira, I. (2021). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Saksi Perpajakan, dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. *Skripsi*.
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889> Diakses pada 18 Februari 2023
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000. (n.d.). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000*. 2.
- Kurniansyah, M. Y. (2022). *Mengenal UU No 7 Tahun 2021 dan Dampak bagi Masyarakat*. <https://www.pajak.com/pwf/mengenal-uu-no-7-tahun-2021-dan-dampak-bagi-masyarakat/> Diakses Pada 19 februari 2023
- Lubis, R. I. (2009). *Pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (survey terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)*. 2008.
- Mintje, M. S. (2020). *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)*. 4(1), 1031–1043.
- Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012*. 2009(526).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013*.
- Pujianto, D., & Kadarsih. (2019). *Pemanfaatan Google Form Sebagai Sarana Peningkatan Layanan*. 10(2).
- Purwanti, I., Utomo, R. B., & Maryani, D. (2015). *Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013*. 6(2), 57–70.
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). *Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System di Kota Tomohon*. 14(1), 130–136.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). *Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553> Diakses pada 20 Januari 2024

- Rohman, R. R. P. dan A. (2015). Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–11.
- Rohmat. (2020). *Realisasi Pelaporan SPT Tahunan PPh OP di Bali Turun 17,8 Persen*. Rohmat. <https://balinesia.id/read/realisasi-pelaporan-spt-tahunan-p-ph-op-di-bali-turun-17-8-persen> Diakses pada 6 Mei 2023
- Rustiyaningsih, S. (2011). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuha Wajib Pajak*. 7.
- Salman, K. R., & Farid, M. (2019). Pengaruh Sikap Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya. *Artikel, January 2008*.
- Setiawan, M. D. (2021). Pengaruh Tax Knowledge dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Mederasi. *Skripsi*.
- Suryanto, S. &. (2020). *DJP UNgkap Sebab Rasio Pajak 2019 Turun jadi 10,7 Persen*. 2020. <https://www.ssas.co.id/djp-ungkap-sebab-rasio-pajak-2019-turun-jadi-107-persen/> Diakses pada 9 Juni 2023
- Trimadani, E. (2019). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak). *Skripsi*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- Wahjudi, D., & Himawan, A. (2014). *Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Kota Semarang*. 3(2), 177–190.
- Wicaksana, S. A. (2021). *Psikologi dan Industri (I)*. Dd Publishing.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Redica Dewi Butar Butar, S., & Narulita Maulidya, Y. (2021). *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi , Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 20(3), 285–294.
- Wulandari, R. (2019). Pengaruh Kebijakan Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surabaya Mulyorejo). *E-Jurnal Akuntansi Untag*.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wijib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Mederasi*. 3(1), 106–116.
- Yusuf, N. F. (2022). *APBD Kabupaten Badung 2021 ditarget Rp3,8 triliun*. <https://bali.antaranews.com/berita/217140/apbd-badung> Diakeses pada 26 Juni 2023